

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat pertahanan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerah secara mandiri Rosemarry (2016) mengungkapkan bahwa alasan diterapkan kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Halaskova (2016) mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Menurut Artini (2017) pemberian otonomi daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan yang dimiliki sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah sangat memerlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Diterapkannya kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar

proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat berkaitan dengan hal tersebut maka pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan. Demikian juga Mahsun (2007) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah memerlukan ukuran penilaian yang lebih kompleks karena variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah beraneka ragam dan menggunakan berbagai metode pengukuran sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diukur hanya dengan menggunakan satu variabel.

Rondonuwu (2015) menyatakan bahwa kemampuan mengelolah keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. APBD adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan Halim (2012). Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin pada APBD masing-masing daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membuat peraturan dalam pembangunan daerah sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah wajib untuk diberikan setiap tahunnya (Lucky 2013).

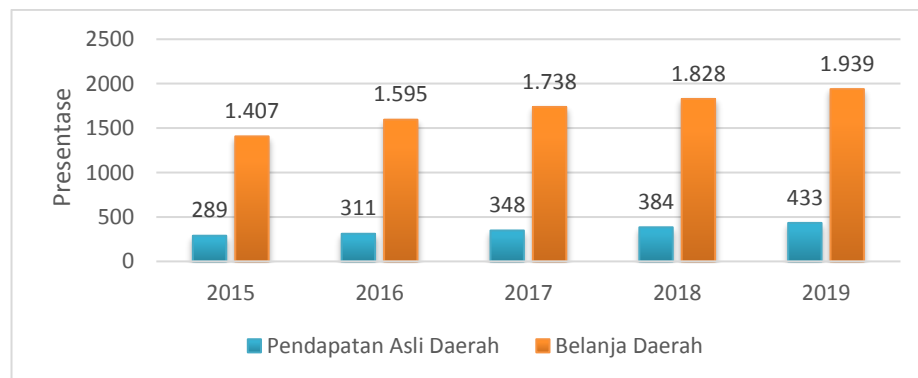
Berkaitan dengan APBD juga sependapat dengan Halim (2008) yang mengatakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau

meningkatkan pertumbuhannya dari setiap periode. Semakin tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dan bernilai positif setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya. Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya menyebabkan pemerintah daerah mampu memenuhi segala kebutuhan daerahnya dan memberikan indikasi bahwa keuangan daerah telah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah dapat dilihat di Grafik 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Sumber :Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Prov Gorontalo



Berdasarkan Grafik 1.1 menunjukkan bahwa selama 5 tahun (2015-2019) belanja daerah mengalami peningkatan, namun kontribusi PAD terhadap belanja daerah masih rendah hanya mencapai sekitar 22% setiap tahunnya.

Berkaitan dengan kondisi PAD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo maka sebelumnya Handika (2016) mendapati bahwa tingkat kemandirian Kota Malang masih rendah, namun demikian tingkat efektivitasnya penerimaan PAD sebagai pendapatan ril Kota Malang dalam kategori sangat

efektif. Efisiensi pembelanjaan Pemerintah Kota Malang dalam kategori cukup efisien. Hasil dari rasio keserasian menunjukkan bahwa belanja rutin lebih besar dari belanja perimbangan, dan seharusnya arah belanja tersebut perlu dirubah. Rasio pertumbuhan PAD Kota Malang selama tahun 2011-2013 dikatakan fluktuasi maka sudah sewajarnya hal tersebut menjadi perhatian pemerintah Kota Malang dalam mengelolah keuangan daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari (2017) mendapati bahwa analisis kinerja keuangan Daerah Kota Palembang dilihat dari (1) Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah berada pada kriteria konsultatif (2) Rasio efektivitas tergolong sangat efektif. (3) Rasio Efisiensi terbilang kurang efisien. (4). Rasio keserasian belanja menunjukkan keseimbangan antra belanja belum seimbang dimana rasio belanja keuangan daerah dilihat dari (1) perhitungan dan analisis share dan growth, posisi Kota Palembang berada pada kuadrat 1 dan dilihat dari (2) indeks kemampuan keuangan (IKK) kemampuan keuangan kota Palembang termasuk tinggi.

Penelitian sejenis juga telah dilakukan oleh Karina (2016) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah baik, untuk rasio kemandirian termasuk dalam pola hubungan partisipatif, untuk rasio efektifitas termasuk dalam kriteria sangat efektif, rasio efisien termasuk dalam kriteria kurang efisien. Penelitian sejenis juga telah diteliti oleh Cristina , (2018) menunjukkan bahwa hasil rasio ketergantungan Pemerintah Kota Jayapura terhadap pemerintah pusat semakin menurun tetapi masih dalam kategori tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih rendah

sekali, rasio epektifitas menunjukkan Realisasi PAD Kota Jayapura pada tahun 2011-2017 menunjukkan hasil sangat efektif.

Penelitian yang sama juga diteliti oleh Puput (2015) menunjukkan bahwa hasil analisis kinerja keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari (1). Rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif, (2). Rasio efisiensi keuangan daerah tergolong efisien, (3). Rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif, (4) Rasio keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanja untuk belanja operasi, (5). Rasio pertumbuhan pendapatan, PAD, belanja operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun dan pertumbuhan belanja modal fluktuatif. Penelitian ini juga dilakukan oleh Mega (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dikatakan efektif sedangkan rasio efisiensi kurang efisien dan rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah, sedangkan rasio aktifitas masih dikatakan kurang baik, dan rasio pertumbuhan sudah dikatakan cukup baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dilihat dari:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan analisis rasio ketergantungan keuangan daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan analisis rasio epektifitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan analisis rasio desentralisasi fiskal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio ketergantungan.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio desentralisasi fiskal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, manfaat penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti empiris mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam penelitian bidang akuntansi.